

AKIBAT HUKUM PEMBEBASAN LAHAN PERMUKIMAN WARGA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS NO.2190/K/Pdt/2013)

Septora Ariatama

Abstrak

Pengadaan Tanah yaitu Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengaturan mengenai pengadaan tanah ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan lain. Dalam pengadaan tanah masalah yang paling kompleks adalah mengenai pemberian ganti kerugian terhadap para pemilik tanah yang permukiman nya masuk dalam kegiatan pengadaan tanah. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur yang seharusnya dalam mensukseskan pengadaan tanah dan bagaimanakah undang-undang serta peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengambilan tanah permukiman warga untuk keperluan pengadaan tanah serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengadaan tanah itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan tanah namun dalam prakteknya masih saja banyak kesalahan baik yang dilakukan oleh instansi pengadaan tanah yang kurang teliti dalam menjalankan tugas dan wewenang nya maupun dari pemilik lahan itu sendiri yang tidak mau permukiman nya dibebaskan untuk kesuksesan pengadaan tanah tersebut. Serta masalah pemberian ganti rugi yang tidak sesuai masih menjadi masalah utama yang terjadi dalam pengadaan tanah sehingga menimbulkan konflik hingga ke lembaga peradilan. Sehingga untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik dalam pengadaan tanah maka pemberian ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ada.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah,Permukiman,Ganti Rugi

DUE TO LEGAL EXEMPTION LAND RESIDENTIAL IN LAND AVAILABILITY FOR THE PUBLIC INTEREST

(A CASE STUDY No.2190 K/Pdt/2013)

Septora Ariatama

Abstract

Namely activities land procurement provide land by granting appropriate compensation and justice to a party who is entitled. Arrangement on land procurement has been arranged in a number of laws and another regulation. In land procurement the most complex problem is on the compensation for the landholders settlement his included in the providing of the land . The problems and the purpose of this study is to find how procedures and procedure as should to ensuring the success of land procurement and how legislation and legislation set about the land residential for the purpose of land procurement due to law and caused by land procurement itself . A theory that used in this research is a justice theory. A method of the approach that is used in research is juridical normative,namely by examining the legislation in accordance with formulation problems above . The results of the study concluded that many regulation that regulate of land while in practice there are still so many error good being done by the agency of land procurement who are not thorough their duty and his authority and from owners own do not want to settlement his are freed to success procurement the land. And problems the provision of compensation which is not appropriate is still a the main problem occurring in procurement the ground so that caused conflicts up to the judiciary.

Keywords: Land Procurement , Settlement , Compensation